BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS) pada pemeriksaan kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan pelaksanaannya belum optimal. Beberapa aspek standar yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 dan Kementerian Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 pada pelayanan kesehatan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit pada pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala masih belum terpenuhi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Komite K3RS dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan kerja dalam pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan berdasarkan teori sistim hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 di RSUD Painan masih belum optimal. Hal ini terkendala dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit (SDMRS), keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas kesehatan serta kesadaran tenaga medis dan non-medis mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala yang masih rendah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Painan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 pada pemeriksaan kesehatan berkala di RSUD Painan adalah:
 - a) menyusun kebijakan dan program K3RS yang lebih terstruktur,
 - b) meningkatkan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan dan sertifikasi,
 - c) mengoptimalkan peran Komite K3RS dalam pelaksanaan program kesehatan kerja.
 - d) mencari sumber pendanaan tambahan agar pemeriksaan kesehatan berkala dapat dilakukan secara lebih luas.

B. Saran

1. Agar RSUD Painan melakukan sosialisasi yang intensif mengenai kebijakan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit kepada seluruh petugas rumah sakit.
2. Agar dibuat kebijakan oleh Direktu RSUD Painan untuk meningkatkan upaya dan pelaksanaan kegiatan preventif dan rehabilitasi medik dan pelaksanaan program pendampingan kembali bekerja pada seluruh petugas rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif.
3. Agar RSUD Painan dapat melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit (SDMRS) baik secara kuantitas dan kuallitas sesuai standar yang sudah ditetapkan pada peraturan-peraturan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan K3RS, merekrutmen pegawai untuk K3RS dan menyusun dan menganalisis kembali tentang struktur organisasi Komite

K3RS sesuai dengan kualifikasi yang ada mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.